

TRANSFORMASI SISTEM EKONOMI INDONESIA MENUJU SISTEM EKONOMI SOSIALISME PASAR

*Ledi Trialdi, I Kadek Dian Sutrisna A.
dan Joko Arif *)*

I. Pendahuluan

Didalam mengatur perekonomian suatu negara diperlukan sebuah sistem. Sistem yang dipilih haruslah mampu menjiwai kehendak dan keinginan dari kebanyakan masyarakat dalam negara tersebut, karena sebuah sistem tidak mungkin akan berjalan dengan baik bila tidak ada kebutuhan dari masyarakat sendiri terhadap berdirinya sistem tersebut.

Pada umumnya semua sistem ekonomi yang ada berkehendak untuk mensejahterakan masyarakat di dalam sistem tersebut. Artinya kesejahteraan sosial lah yang diutamakan. Maksud seperti ini terdapat pula dalam sistem yang dinamakan kapitalisme sekalipun. Meski prinsip kebebasan individu yang sangat diutamakan di dalam kapitalisme namun tujuan akhirnya, seperti yang dikemukakan Adam Smith (pelopor dari kapitalisme), adalah untuk mencapai efisiensi perekonomian yang akan membawa kepada kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan. Jika pada akhirnya tujuan awal tersebut tidak tercapai, kesejahteraan sosial tidak kunjung bisa diwujudkan, itu permasalahan yang berbeda. Sistem sosialisme pun yang memang belum pernah diwujudkan secara murni seperti halnya kapitalisme, belum bisa pula benar-benar memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Masalah inilah sebenarnya yang hendak kami bahas dalam tulisan ini. Pada dasarnya kami setuju dengan sistem sosialisme, akan tetapi dalam pelaksanaannya kami merasa perlu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan khusus mengenai penerapan sistem ini. Pada bagian pertama makalah ini akan kami bahas mengenai sistem ekonomi sosialisme *centrally planned* yang telah dijalankan oleh negara Uni Soviet. Selanjutnya pada bagian kedua akan kami bahas mengenai sistem ekonomi sosialisme pasar atau *decentralized socialism*, seperti yang telah diterapkan di beberapa negara Eropa Timur. Dari analisis terhadap kedua sistem sosialisme di atas, dengan merujuk kepada buku *Comparing Economic Systems* (Andrew Zimbalist dkk.), *Politics, Economics and Welfare* (Robert A. Dahl dkk) beserta tambahan dari beberapa buku lainnya, kami lebih menyetujui sistem ekonomi sosialis pasar untuk berlaku

*) Ledi Trialdi, I Kadek Dian Sutrisna A., dan Joko Arif : ketiganya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

dalam sistem perekonomian di Indonesia. Dengan demikian yang kami anggap penting untuk ditelaah secara lebih mendalam dalam tulisan ini adalah mengenai proses transformasi kepada sistem ekonomi sosialisme pasar.

Pada bagian akhir dari tulisan kita akan lihat bagaimana kondisi di Indonesia, baik dari segi institusional maupun hukum untuk berlakunya sistem ekonomi sosialisme pasar.

II. Sistem Ekonomi Perencanaan Sentral Sosialis

Sejarah Sistem Ekonomi Perencanaan Sentral Sosialis

Sistem ekonomi sosialis jika dilihat dari sejarahnya merupakan kelanjutan dari pemikiran Karl Marx (1818-1883) dalam bukunya, *Das Capital* (1867). Pemikiran Karl Marx ini lahir sebagai kritik atas kapitalisme. Menurut teori *political economy* yang dikemukakan oleh Marx dengan menggunakan analisis dialektik *Hegelian*, dikatakan bahwa di dalam kapitalisme ada pertentangan kepentingan antara kaum pemilik modal dengan kaum buruh yang terus di eksploitasi. Pertentangan antara kaum buruh dengan pemilik modal inilah yang pada akhirnya akan meruntuhkan kapitalisme. Proses transisi dari kapitalisme ke sosialisme adalah suatu *natural historical process* yang tak dapat dielakkan lagi akibat perkembangan di dalam masyarakat kapitalis itu sendiri.

Karl Marx serta para pemikir sistem ekonomi sosialis lainnya seperti Frederick Engels dan Vladimir Lenin, berdasarkan teori revolusi sosial yang dikembangkannya, mengemukakan bahwa kapitalisme membangkitkan *material preconditions* melalui pola produksi dan arah pembangunannya untuk transisi revolusioner kapitalisme ke arah sistem sosialis komunis. Pergantian sistem kapitalisme oleh sosialisme ini tidak dapat terjadi begitu saja. Kapitalisme hanya dapat dihentikan melalui sebuah revolusi sosial yang dapat menghilangkan kekuatan politik kaum kapitalis dan tekanan serta eksploitasi terhadap kaum buruh. Revolusi oktober yang terjadi di Rusia pada tahun 1917 adalah revolusi sosial yang dilakukan oleh kekuatan sosial revolusioner, yaitu kaum proletar, adalah untuk membangun sosialisme, mengakhiri perbedaan sosial atas kelas-kelas, menjadikan seluruh anggota masyarakat pekerja, dan menghilangkan sumber dari seluruh eksploitasi manusia oleh manusia.¹

Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dilakukanlah apa yang disebut dengan *socialist nationalization*. *Socialist nationalization* atau nasionalisasi sosialis adalah pengambilalihan secara revolusioner kepemilikan dari kelas yang mengeksploitasi oleh negara yang proletar dan mengubahnya menjadi milik negara, milik sosialis. Menurut

1 *Political Economy: Socialism*, ed. G.A. Kozlov, Progress Publishers, Moscow 1977, hal. 20

Lenin, proses sosialisasi produksi menurut cara sosialis bukanlah hanya sekedar masalah pengambilalihan kepemilikan, melainkan juga perusahaan yang menjadi milik masyarakat haruslah benar-benar tersosialisasi. Kegiatan atau aktivitas dari perusahaan tersebut harus mementingkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Untuk tujuan tersebut maka harus dilakukan pengawasan keuangan yang ketat, kontrol produksi dan distribusi produk yang diorganisasikan dalam perusahaan yang sosial, dan lain-lain. Dengan demikian di dalam sistem ekonomi sosialisnya Marx dan Engels yang kemudian diterapkan oleh Lenin di USSR, digunakan mekanisme ekonomi perencanaan sentral. Perencanaan seperti ini bersifat menyeluruh dan mencakup keseluruhan perekonomian dimana ada satu penguasa pusat yang merencanakan, mengatur dan memerintahkan pelaksanaan rencana sesuai dengan sasaran dan prioritas yang telah ditentukan sebelumnya.²

Mekanisme Perencanaan Sentral Sosialis dalam Praktek

Zimbalist, Sherman dan Brown dalam buku mereka mengemukakan definisi sistem ekonomi perencanaan sentral sebagai berikut: “*Centrally Planned Socialism, which is defined as a system in which the central government plans all major prices, outputs, and technologies; the plan is a law that must be obeyed by managers*”.³

Dalam sistem ini, penetapan besarnya harga dan siapa yang memproduksi ditentukan melalui suatu perencanaan yang sifatnya terpusat yang dilakukan oleh sebuah badan yang disebut *Central Planning Board* (CPB), sebuah badan yang menangani perencanaan ekonomi. Kekuasaan ekonomi secara penuh terpusat di tangan badan tersebut. Ia menetapkan tujuan, prioritas dan sasaran rencana. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang telah diletakkan dalam rencana pada jangka waktu yang telah ditetapkan, ia mengorganisasikan dan mengalokasikan sumber ekonomi dengan komando dan pengawasan secara terencana.

CPB menentukan barang dan jasa yang akan dihasilkan dalam suatu periode perencanaan, misalnya satu tahun. Dari survei atas faktor-faktor input yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan input antara yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah unit output (biasanya didasarkan atas hubungan input-output secara historis), CPB menyusun daftar input yang dibutuhkan oleh output yang ingin dihasilkan tersebut. Di sini sebuah mekanisme berjalan, dimana CPB berusaha memaksimalkan produksi namun dihadapkan pada *constraint* input yang tersedia. Ketersediaan input membatasi jumlah output, dengan anggapan bahwa teknologi tidak berubah.

² M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hal. 664

³ Andrew Zimbalist et al., *Comparing Economic System: A political-economic Approach*, (Florida: Hartcourt Brace Jovanovich, Inc., 1989), hal. 10

CPB harus mengetahui sumber-sumber daya apa saja yang tersedia, apa yang dibutuhkan, dan keterkaitan di antara keduanya. Disini terlihat penting adanya keseimbangan antara jumlah yang dibutuhkan (permintaan) dan jumlah yang tersedia (penawaran). Jika terjadi ketidakseimbangan (*excess demand* atau *excess supply*), maka harus dilakukan langkah-langkah administratif untuk mengurangi kelebihan pada salah satu sisi.

Pada sisi penawaran, ada tiga sumber utama dari input: produksi, stok dan impor. Pada sisi permintaan, dua elemen utamanya adalah: permintaan antar industri, dimana output industri yang satu digunakan sebagai input industri yang lain, serta permintaan akhir (*final demand*), terdiri atas output yang ditujukan untuk investasi, konsumsi rumah tangga dan ekspor. Akan menjadi permasalahan yang sangat rumit untuk menciptakan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dalam hal ini CPB bertugas menghitung berapa besar kebutuhan di tiap-tiap sektor elemen permintaan untuk dijadikan dasar dalam menghitung jumlah produksi yang akan dihasilkan. Sepintas kelihatan sangatlah sederhana, tetapi keterkaitan antar industri menunjukkan bahwa input dari satu industri ditentukan pula oleh perencanaan output dari industri lainnya. Disinilah hakekat dari ekonomi komando kembali berperan. Keputusan di tingkat pusat akan menentukan industri apa yang akan dijadikan andalan dalam sebuah periode perencanaan. Industri inilah yang akan menjadi ujung dari lingkaran keterkaitan tersebut.

Dalam memenuhi permintaan rumah tangga, satu hal yang unik adalah bahwa keputusan untuk mengkonsumsi suatu barang dari tiap-tiap rumah tangga diasumsikan sama. Jika dalam teori pasar dikenal adanya istilah *consumer* dan *producer surplus*, maka dengan adanya perencanaan kedua konsep ini menjadi tidak relevan. Harga yang dipatok pada tingkat tertentu menyebabkan inflasi secara nominal tidak terjadi. Demikian juga dengan alokasi sumber daya. Jika dalam kapitalisme sumber daya akan bergerak ke sektor yang tengah berkembang dan menawarkan *rate of return* yang tinggi, mobilitas sumber daya dalam sistem ini terjadi akibat perencanaan dan komando. CPB telah mengalokasi jumlah tertentu dari sumber daya untuk masing-masing sektor. Perencanaan ekonominya mengandung keputusan makroekonomi dan mikroekonomi. CPB memutuskan distribusi pendapatan nasional ke dalam investasi, konsumsi dan jasa pemerintah, termasuk pula pertahanan. Pada prinsipnya perencanaan pusat didasarkan pada pertimbangan makroekonomi jangka panjang.

Keunggulan dari Sistem Ekonomi Perencanaan Sentral Sosialis

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi bersamaan dengan industrialisasi perekonomian adalah daya tarik utama dari Perencanaan Sentral Sosialis (PSS). Karena PSS mampu, paling tidak secara teoritis, untuk menghasilkan dampak-dampak tertentu yang

diinginkan ke arah tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Beberapa dampak positif dari PSS terlihat dalam bidang sosio-ekonomi dan ekonomi itu sendiri, terutama dalam hal mobilisasi sumber daya, pengurangan ketidaksempurnaan mekanisme pasar dan stabilitas ekonomi.

Kepemilikan secara sosial membuat pembangunan ekonomi menjadi lebih mungkin terjadi tanpa harus mengakibatkan ketidakmerataan distribusi pendapatan, suatu kondisi yang sering terjadi sebagai *trade off* dalam usaha suatu perekonomian untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dari sudut lain, PSS memberikan efisiensi ekonomi yang lebih tinggi karena alat-alat produksi tidak diserahkan kepada kekuatan pasar, melainkan diawasi dan diatur oleh badan perencanaan dengan cara yang paling efisien. *Capital Formation* di dalam PSS menjadi lebih besar dibandingkan sistem ekonomi pasar karena modal digunakan seefisien mungkin untuk lebih meningkatkan tingkat *saving* dan *investment*. Adanya proses *extensive development* akan lebih meningkatkan penggunaan tenaga kerja, baik yang tidak terpakai dari sektor pertanian maupun *unemployment urban labour*. Keberadaan eksternalitas yang terjadi akibat ketidaksempurnaan pasar dapat dikurangi dalam sistem PSS, dengan adanya kepemilikan sosial dan sentralisasi. Selain semua yang telah disebutkan di atas, sistem PSS juga lebih menjamin adanya kestabilan ekonomi pada tingkat harga dan upah, serta kemampuan untuk meminimalisir pengaruh dari tekanan dan gangguan siklus ekonomi eksternal.

Kelemahan Sistem Ekonomi Perencanaan Sentral Sosialis

Sesuai dengan karakteristik dari sistem PSS, dimana setiap kegiatan perekonomian diatur oleh penguasa pusat, maka sistem ekonomi ini akan mengakibatkan gangguan pada efisiensi ekonomi. Sistem PSS selalu tidak memuaskan karena sistem ekonomi ini sangat rumit. Dalam rangka meningkatkan output suatu komoditi, diperlukan peningkatan output komplementernya atau pengurangan output komoditi substitusinya. Seperti yang dikatakan oleh Lewis, "Hasil perencanaan dengan komando ini selalu berupa kelangkaan pada beberapa barang dan surplus pada barang lainnya."⁴

Sistem ekonomi PSS ini berkaitan erat dengan rezim birokratis dan totaliter. Tidak ada kemerdekaan ekonomi, dimana pasar konsumen dan pasar buruh ditentukan oleh penguasa perencanaan. Karena pendistribusian dan pengendalian harga sangat bergantung kepada birokrasi, maka kekuasaan birokrasi yang absolut ini akan mengarahkan pada kecenderungan untuk korupsi, kolusi dan nepotisme. Sistem ini menimbulkan apa yang disebut Lewis sebagai kecenderungan pemaksaan yang mengakibatkan standarisasi yang

4. M. L. Jhingan, *op. cit.*, hal. 665

berlebihan demi mempermudah proses produksi. Produk dibuat standar dan tanpa ragam. Pembuatan suatu barang dengan satu jenis dan usaha, serta menghilangkan dorongan untuk berinovasi. Dengan adanya prioritas ekonomi yang mengabaikan sektor pertanian, maka terjadilah pengangguran tersembunyi yang ditransfer dari sektor pertanian ke sektor industri. Prioritas ekonomi dan *extensive development* memang mengakibatkan peningkatan output dari sektor industri tetapi mengakibatkan semakin terabaikannya sektor pertanian dan kinerja jangka panjang dari sektor tersebut. Industrialisasi juga semakin meningkatkan urbanisasi dan menambah masalah-masalah sosial di daerah perkotaan.

III. Sistem Ekonomi Sosialis Pasar

Teori mengenai sistem ekonomi sosialis pasar dikemukakan pertama kali oleh Oskar Lange sebagai jawaban atas kritik yang dilontarkan oleh Friedrich Hayek mengenai sistem ekonomi sosialis dengan perencanaan yang terpusat. Lange beranggapan bahwa dengan sosialis pasar atau sosialis yang terdesentralisasi, tak akan timbul lebih banyak masalah dari perusahaan swasta yang kompetitif dalam mencapai tingkat harga yang rasional dan alokasi sumber daya secara optimal.

Dalam sistem ekonomi sosialis pasar Lange, alat-alat produksi dalam perekonomian dimiliki oleh publik. *Central Planning Board* (CPB) tetap ada dalam sistem sosialis ini dengan fungsi antara lain: mengangkat direktur dari perusahaan dan dari keseluruhan industri; menetapkan aturan mengenai keputusan produksinya; menetapkan harga atas semua barang kapital dan input-input non tenaga kerja (harga barang-barang konsumen dan tingkat upah ditentukan secara bebas oleh kekuatan penawaran dan permintaan di dalam pasar); memilih tingkat akumulasi kapital (investasi) dan menetapkan tingkat bunga untuk menyeimbangkan jumlah penawaran dari modal dengan permintaannya.

Keputusan mengenai apa, berapa banyak, dan bagaimana produksi dibuat oleh manajer dari perusahaan dan industri-industri berdasarkan dua aturan yang dibuat oleh CPB. Aturan pertama adalah bahwa perusahaan harus memproduksi hingga mencapai tingkat output dimana biaya marjinal produksinya sama dengan harga output yang ditetapkan oleh CPB. Aturan yang kedua adalah bahwa perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksinya hingga jumlah dollar yang dikeluarkan untuk masing-masing faktor sama dengan jumlah tambahan output yang dihasilkan.

Penetapan harga oleh CPB dalam sistem Lange adalah dengan melalui mekanisme pasar. CPB menetapkan harga output berdasarkan penurunan dan peningkatan inventori perusahaan. Bila inventori perusahaan naik, artinya telah terjadi kelebihan penawaran di pasar, maka CPB akan melakukan penurunan harga. Begitu pula sebaliknya. Pada akhirnya,

jika dua aturan CPB di atas dijalankan, melalui pasar bebas dalam tenaga kerja dan barang-barang konsumsi, sistem akan menghasilkan suatu alokasi sumber daya yang efisien.

Sistem Lange ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

1. Dengan CPB yang memiliki pandangan yang lebih luas mengenai perekonomian dibandingkan dengan *entrepreneur* swasta dalam menetapkan harga, maka ia akan mampu mencapai keseimbangan harga yang tepat dengan waktu uji yang lebih singkat.
2. Dalam menetapkan harga, CPB bisa secara eksplisit dan langsung memasukkan biaya sosial sebagai tambahan dari biaya perusahaan.
3. Kepemilikan publik atas alat-alat produksi akan menghilangkan *property income* yang selama ini dianggap sebagai sumber dari ketimpangan pendapatan.
4. Perekonomian yang tetap sosialis tidak akan menjadi subjek dari fluktuasi siklus bisnis (*business cycle*).

Sistem Lange mendapat kritikan dari Hayek dan Bergson, antara lain karena kemungkinan besar sulitnya CPB untuk menetapkan harga atas ratusan ribu barang yang ada dalam perekonomian dan sulitnya CPB untuk memperoleh data yang akurat dan periodik mengenai informasi jumlah inventori. Disamping itu pula CPB akan sulit untuk mengontrol setiap perusahaan bahwa ia benar-benar mengikuti dua aturan CPB dalam menetapkan output dan meminimalkan biaya.

Hal yang kedua dari kritik di atas mungkin muncul karena keterbatasan pengetahuan CPB mengenai insentif dan motivasi dari manajer maupun pekerja. Sistem Lange ini mungkin akan berhasil bila masyarakat yang ada demokratis dan publik merasa benar-benar terwakili oleh pasar dari barang konsumen dan oleh CPB, karena dari kondisi seperti inilah akan terjadi suatu keinginan umum untuk melakukan kerjasama.

Kekurangan dari sistem Lange di atas coba diatasi oleh seorang ahli ekonomi Polandia, Wlodzimierz Brus. Ia mengusulkan adanya pembenahan institusional dengan memasukkan partisipasi pekerja di dalam manajemen perusahaan. Artinya, di dalam perusahaan dengan demikian akan berkembang pengambilan keputusan, insentif, dan tanggung jawab yang kolektif. Inilah ciri yang paling esensial dari usaha desentralisasi yang efektif. Dengan adanya partisipasi pekerja pada manajemen perusahaan, masyarakat yang demokratis di dalam sistem ekonomi sosialis pasar seperti yang diinginkan oleh Lange terwujud pada tingkat perusahaan.⁵

Sistem ekonomi sosialis pasar Lange dan self-management yang dikemukakan oleh Brus inilah yang kemudian diterapkan oleh Yugoslavia. Dengan sistem seperti ini, Yugoslavia

5. Andrew Zimbalist et al., *op. cit.*, hal.389-394

bisa menghasilkan kinerja ekonomi yang cukup baik meskipun ia dihadapkan oleh banyak kesulitan, antara lain misalnya perbedaan kultural, etnik dan bahasa, masyarakat yang terpecah belah akibat perang, populasi masyarakat desa yang cukup besar, dasar industri yang kecil, serta lemahnya tingkat pendidikan dan sedikitnya pengetahuan mengenai proses manufaktur dari pekerja yang sangat kurang kondusif untuk tingkat partisipasi pekerja yang tinggi dalam manajemen.

IV. Transformasi Menuju Sistem Ekonomi Sosialis Pasar

Rasionalitas Sistem Ekonomi Sosialis Pasar

Setiap sistem ekonomi yang ada pada dasarnya mengarahkan suatu negara kepada suatu proses sosio-politiko-ekonomi untuk mencapai tujuh tujuan dari tindakan sosial yang rasional, antara lain:⁶

1. Kebebasan, yang diartikan sebagai absennya rintangan untuk mewujudkan keinginan. Kondisi ini bisa dimaksimalkan dengan menghilangkan rintangan, merubah keinginan, atau dengan merubah keduanya.
2. Rasionalitas. Untuk memaksimalkan kebebasan dibutuhkan kalkulasi yang rasional dan kontrol.
3. Demokrasi, yang diartikan sebagai prinsip dan metode untuk mengatur konflik yang terjadi antar individu dalam usaha mereka untuk memaksimalkan kebebasannya.
4. Persamaan yang dilihat secara subjektif, yaitu individu bisa mendapatkan persamaan yang sesuai dan proporsional dengan preferensi masing-masing.
5. Sekuritas, yaitu jaminan akan masa depan.
6. Kemajuan, yang diartikan oleh Dahl sebagai peningkatan dari kebebasan.
7. Keterlibatan yang tepat dari pihak-pihak yang ada dalam proses sosial yang terjadi.

Dari ketujuh poin diatas kita bisa menarik inti dari permasalahan sosio-politiko-ekonomi, yakni pemaksimalan kebebasan. Kebebasan sendiri adalah tidak tak terbatas karena adanya keterbatasan alami (fisikal, fisiologikal, teknologikal, dan psikologikal), keterbatasan yang diakibatkan oleh konflik pada tujuan yang dimiliki dalam diri seseorang maupun oleh konsekuensi yang berlawanan dari tindakan pencapaian tujuan dari orang lain. Oleh karena itulah hal yang paling utama untuk memaksimalkan kebebasan ini adalah adanya perhitungan yang rasional dan kontrol.

6. Robert A. Dahl & Charles E. Lindblom, *Politics, Economics, and Welfare: Planning and Politico-Economy System resolved into Basic Social Processes* (New York: Harper Torchbooks, 1953), hal. 28-52

Kontrol bisa dilakukan secara spontan seperti pada ekonomi kapitalis, meskipun biasanya pada akhirnya akan terjadi manipulasi di dalam kontrol tersebut. Kecenderungan buruk dari kontrol yang dilakukan secara spontan ini coba dirubah dalam *centrally planned socialism* dengan melakukan kontrol melalui cara komando. Inilah yang dilakukan oleh sistem ekonomi sosialis pasar, dan tampak lebih rasional dari kedua cara sebelumnya.

Syarat-syarat Transformasi Menuju Sistem Ekonomi Sosialisme Pasar

Perpindahan menuju sistem sosialis pasar membutuhkan suatu landasan yang kuat untuk mendukung berjalannya sistem tersebut. Perubahan politik yang mengakui adanya perbedaan dalam nilai dan inisiatif individu, konsensus sosial dan politik adalah merupakan suatu proses yang bertahap untuk mewujudkan landasan tersebut. Inilah yang dinamakan sebagai *proses transformasi yang mereformasi semua elemen dan mekanisme dalam sistem ekonomi PSS dengan sistem ekonomi pasar*.

Transformasi yang dibutuhkan untuk jalannya sistem ekonomi sosialis pasar dapat digolongkan menjadi empat kategori utama yaitu: (1) privatisasi, (2) marketisasi, (3) stabilisasi, dan (4) pembangunan institusi.⁷

1. Privatisasi

Dalam sistem perekonomian PSS, tidak ada kepemilikan swasta atas perusahaan, semuanya merupakan milik negara dan diatur oleh negara. Di saat birokrasi dan kekuasaan yang korup masuk ke dalam sistem ini, maka sistem tidak akan berjalan secara efisien. Campur tangan pemerintah yang terlalu berlebihan dalam penentuan keputusan ekonomi juga menyebabkan perusahaan negara ini tidak berjalan secara efisien dan malahan akan menimbulkan eksternalitas negatif bagi perekonomian. Oleh karena itulah privatisasi atas perusahaan milik negara ini perlu dilakukan sehingga tidak ada lagi pembatasan dalam produksi dan ketetapan harga secara irasional (tidak menunjukkan kelangkaan sumber daya yang sebenarnya).

Proses privatisasi ini merupakan bagian transformasi yang sulit untuk dilaksanakan. Permasalahan itu antara lain:

1. Cabang produksi mana yang harus diprivatisasi dan apa akibatnya serta berapa lama.
2. Sifat dan waktu dari restrukturisasi untuk perusahaan negara, contohnya restrukturisasi industri yang mencakup banyak perusahaan; restrukturisasi finansial (penghapusan hutang); restrukturisasi fisik (mengganti peralatan). Dalam proses sebelum dilakukan privatisasi atau perusahaan langsung diserahkan saja kepada pemilik swasta yang baru.

7. Morris Bornstein, *Comparative Economic Systems: Models and Cases* (Sydney: Rivhard D. Irwin, Inc., 1989), hal. 381-383

3. Pilihan metode yang digunakan untuk pelepasan aset negara (misalnya, pada tingkat mana perusahaan tersebut harus dijual, seperti Yugoslavia membagi kepemilikan saham perusahaan kepada pekerja).

2. *Marketisasi*

Marketisasi membutuhkan pergantian dari perencanaan yang terpusat menjadi pelepasan kepada mekanisme pasar untuk barang, jasa dan juga faktor produksi, namun tetap dengan adanya suatu koordinasi dan mekanisme alokasi. Tugas yang paling utama yaitu dengan mengganti harga yang irasional (tidak menunjukkan rasio kelangkaan) ke dalam *market-clearing price* untuk barang dan pasar faktor (termasuk *financial market*). Tugas yang kedua adalah membangun suatu sistem finansial dan perdagangan luar negeri, termasuk pemebentukan *currency convertability*.

Tetapi proses transformasi harga ini bagaimanapun sangat sulit untuk dilakukan bila harga terlalu jauh dari ekuilibrium dan pentingnya distribusi pendapatan dan produksi sangat besar. Perlu ditekankan disini bahwa privatisasi dan *marketization* sangatlah tergantung pada penciptaan *institution framework* yang tepat.

3. *Stabilisasi*

Untuk memastikan sistem sosialisme pasar ini berjalan secara efektif maka stabilitas kondisi makroekonomi sangat diperlukan. Stabilisasi tersebut mencakup keseimbangan eksternal dan internal. Disinilah diperlukan suatu alat dan instrumen sebagai sarana untuk menciptakan stabilisasi ekonomi ini, seperti instrumen kebijaksanaan moneter yang secara luas menjamin stabilitas makroekonomi.

4. *Pembangunan Institusi*

Untuk melepaskan sebagian dari sistem ke dalam mekanisme pasar, maka harus ada suatu institusi yang kuat untuk mengatur jalannya mekanisme pasar tersebut. Inilah yang dijadikan landasan sekaligus kontrol dalam suatu sistem ekonomi sosialis pasar. *Institutional setting* menciptakan suatu *rule of the game* dalam mekanisme pasar. Institusi ini mencakup hukum, kelembagaan dan struktur fiskal. Misalnya diperlukan institusi yang baru untuk perbankan dan pasar modal dan sistem fiskal yang akan dapat menjamin kondisi makroekonomi yang stabil.

Disamping itu hal yang paling penting adalah pemerintahan yang bersih dan tidak korup yang dapat menciptakan iklim dan kondisi persaingan yang sehat. Bisnis yang besar dan pemerintahan yang besar tidak berarti bila tidak adanya masyarakat yang besar sebagai kontrol.

Jadi pembangunan institusi (kelembagaan) inilah yang akan mendasari berjalannya sebuah sistem sehingga dengan institusi yang mantap maka sistem pasar akan berjalan secara efektif.

V. Proses Transformasi Sistem Ekonomi Indonesia

Untuk menerapkan semua kajian dari materi di atas ke dalam sistem perekonomian Indonesia, maka sebelumnya perlu dilakukan analisis tentang sistem perekonomian Indonesia sendiri dengan menggunakan analisis tradisional, yaitu struktur, perilaku dan kinerja.

Saat menganalisis struktur, maka kita akan melihat bagaiman struktur dari sistem ekonomi di Indonesia, yang mencakup filosofi dari sistem ekonomi Indonesia. Perilaku, mencakup segala kebijaksanaan yang telah diambil oleh pemerintah dalam perekonomian kinerja, merupakan kinerja dari segala kebijaksanaan tersebut yang tentunya mencakup *social welfare*.

Struktur Sistem Ekonomi di Indonesia

Dasar bagi sistem ekonomi Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945, yakni demokrasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan, dengan koperasi sebagai lembaga perekonomian yang paling sesuai. Tetapi dalam sistem ekonomi Indonesia kita menerima tiga bentuk badan usaha yaitu badan usaha milik negara (BUMN), swasta, dan koperasi.

Sebagai dasar titik tolak, maka pasal 33 UUD 1945 yang terdiri dari tiga ayat ini perlu dikutipkan disini: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang paling penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perlu digarisbawahi bahwa menguasai bukanlah berarti memiliki, dan untuk memisahkan pengertian di atas maka diperlukan suatu hukum yang tegas dan berwibawa. Seperti juga pernah dikemukakan oleh Hatta: dikuasai oleh negara tidak berarti bahwa pemerintah sendiri yang menjadi pengusaha dengan segala birokrasi yang ada padanya. Pekerjaan dapat diserahkan kepada badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab kepada pemerintah. Dalam masa peralihan badan-badan itu boleh berbentuk perusahaan-perusahaan negara yang berbentuk badan hukum atau perusahaan-perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas.⁸ Sedangkan sektor swasta sendiri tidak tersurat tetapi tersirat dalam UUD 1945.

⁸ Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia* (jakarta: Penerbit Djambatan, 1960), hal. 24-25

Sektor swasta diatur dalam KUHD yang didasari oleh Aturan Peralihan (Ayat II: "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini"), namun sampai sekarang aturan ini belum mengalami tanggapan yang serius sehingga sektor swasta yang bermoralkan persaingan (liberalisme-kapitalisme), nilai transaksi dan motif ekonomi untuk mencari laba, tumbuh pesat dalam perekonomian Indonesia. Inilah yang menimbulkan dualisme dalam sistem perekonomian Indonesia, di satu sisi ada koperasi dengan jiwa kekeluargaan dan kebersamaan yang menunjukkan demokrasi ekonomi, di sisi lain sektor swasta dengan semangat yang individualistis dan bermoralkan persaingan berjiwa liberal-kapitalis.

Pada masa transisi, melalui proses demokratisasi ekonomi, diharapkan dapat tercipta sektor-sektor swasta yang berjiwa koperasi. Ini dapat diwujudkan melalui kepemilikan saham oleh para pekerja/buruh dalam perusahaan yang bersangkutan sehingga buruh mempunyai *co-responsibility*, *co-ownership* dan *co-determination*. Di sini diterapkan *participatory* dan *emancipatory* sehingga secara langsung para buruh dapat melakukan kontrol terhadap perusahaan.

Kebijaksanaan Perekonomian

Melihat adanya dualisme dalam sistem perekonomian di Indonesia, maka perlu ditinjau kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam sistem perekonomian Indonesia selama ini. Pada tahun 1950-1960an, ketika Indonesia menganut sistem ekonomi terpimpin, pemerintah melakukan kebijaksanaan nasionalisasi badan usaha. Politik menjadi panglima pada saat itu sehingga kebijaksanaan pemerintah lebih mengarah pada stabilitas politik. Mulai tahun 1967 yaitu ketika dikeluarkannya UU PMA, terlihat bahwa peran swasta semakin menonjol. Investor asing bebas untuk masuk ke dalam negeri dan menanamkan modalnya dengan menikmati berbagai fasilitas dari pemerintah.

Sejak menurunnya harga minyak bumi pada tahun 1986, penerimaan pemerintah di sektor migas menurun secara drastis sehingga dirasakan perlu untuk meningkatkan tabungan swasta untuk menggairahkan kembali perekonomian. Oleh karena itu dilaksanakanlah beberapa paket deregulasi dari tahun 1983-1988 yang diawali dengan mekanisme pasar (Juni 1983). kemudian, untuk meningkatkan persaingan antar bank dalam memobilisasi dana sebagai dana pembangunan, maka pada tahun 1988 dikeluarkan paket deregulasi yang pada intinya memberikan kemudahan untuk mendirikan sebuah bank.

Sejak saat itu terlihat kebijaksanaan pemerintah yang lebih mengandalkan mekanisme pasar karena dianggap lebih efisien daripada campur tangan pemerintah yang terlalu banyak dalam perekonomian. BUMN mulai diprivatisasi dan investor asing semakin banyak masuk untuk menikmati kekayaan alam Indonesia. Restrukturisasi sektor perbankan menyebabkan menjamurnya bank-bank swasta dalam sistem perbankan di Indonesia.

Deregulasi ini merupakan suatu usaha restrukturisasi perekonomian, terutama di sektor moneter. Hal ini merupakan usaha untuk mengalihkan peran pemerintah yang terlalu besar. Tetapi restrukturisasi dengan segala paket deregulasinya menyebabkan timbul suatu paradigma baru dalam sistem perekonomian Indonesia. Peran swasta dalam perekonomian semakin besar, dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah. Ketika unsur politik dan kekuasaan masuk maka terjadilah persaingan yang tidak sehat. Muncullah konglomerat-konglomerat yang dijadikan sebagai motor dalam perekonomian.

Kebijaksanaan mekanisme pasar ini sebenarnya telah melupakan proses transformasi yaitu pembangunan kelembagaan yang sangat penting sebagai landasan dalam mekanisme pasar dimana komponen-komponen kelembagaan tersebut (menurut *Strategic Basic Need*) mencakup struktur kekuasaan (*Power structure*), representasi politik (*Political Representation*), administrasi negara (*Bureaucracy*), lembaga kontrol sosial (pers, organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain) dan sistem hukum.

Mengacu pada kajian sistem sosialisme pasar yang sebelumnya mengalami transformasi, maka perlu kiranya dilakukan restrukturisasi dalam sistem perekonomian Indonesia (Swasono, 1993) secara luas yang meliputi berbagai sektor, bidang dan dimensi, antara lain:

- (1) Restrukturisasi kepemilikan dan penguasaan aset ekonomi.
Kepemilikan oleh rakyat harus semakin merata dan mengurangi secara struktural konsentrasi-konsentrasi kepemilikan dan penguasaan aset.
- (2) Restrukturisasi alokatif
Menyangkut alokasi dana-dana pembangunan, baik dana anggaran nasional ataupun daerah, baik yang berasal dari perbankan ataupun dari non bank.
- (3) Restrukturisasi spasial
Diperlukan untuk mencapai pemerataan dan keseimbangan pembangunan serta pertumbuhan antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia.
- (4) Restrukturisasi sektoral
Diperlukan terutama untuk mencapai keseimbangan antar sektor, baik sektor industri dan pertanian maupun sektor informal-tradisional.
- (5) Restrukturisasi strategis
Merupakan upaya untuk memperkuat perekonomian dalam negeri dengan mengurangi segala ketergantungan terhadap pihak luar.
- (6) Restrukturisasi pola pikir
Reorientasi ke arah pemihakan lebih banyak kepada hak-hak rakyat.
- (7) Restrukturisasi perpajakan
Menerapkan pajak progresif dengan menerapkan prinsip keadilan.

(8) Restrukturisasi di bidang sosial-budaya

Merupakan bagian dari pembangunan institusi, dengan menciptakan budaya pemerintah, hukum, dan rakyat yang demokratis.

Peralihan kebijaksanaan pemerintah yang lebih mengarah pada mekanisme pasar sebenarnya memerlukan suatu proses transformasi secara bertahap (masa transisi) untuk membangun suatu kelembagaan dan infrastruktur yang kuat, yang menjamin berjalannya mekanisme pasar secara efisien dan efektif. Dan yang paling penting diperhatikan adalah kesiapan individu-individu dalam sistem ekonomi untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ini tentunya sangat berhubungan dengan restrukturisasi sosial budaya masyarakat Indonesia.

VI. Penutup

Dualisme yang terdapat dalam sistem ekonomi Indonesia, dimana di satu sisi pasal 33 UUD 1945 dengan jiwa demokrasi ekonomi dan disisi lain Aturan Peralihan (ayat II) dengan kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang bermoral persaingan (liberalisme-kapitalisme), memerlukan suatu proses demokratisasi menuju pasal UU Pokok Perekonomian Nasional. Ini merupakan masa transisi untuk membangun koperasi sebagai soko guru dan mem Pasal 33-kan KUHD untuk menuju pada sistem ekonomi yang mencerminkan *co-ownership*, *co-determination* dan *co-responsibility*.

Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kekuatan swasta dengan asas individualistis semakin berkembang dalam perekonomian Indonesia. Hadirnya para konglomerat dan investor asing sebagai motor penggerak perekonomian menciptakan paradigma yang baru dalam sistem ekonomi Indonesia, yaitu paradigma yang bermoral persaingan, nilai transaksi, akuisisi motif ekonomi: laba (profit). Dalam hal ini, kebijaksanaan pemerintah juga terlalu banyak memberikan fasilitas untuk berkembangnya kekuatan-kekuatan ekonomi tersebut sedangkan kekekuatan ekonomi rakyat kurang mendapat sentuhan.

Diterimanya bentuk badan usaha swasta dalam sistem ekonomi Indonesia dan selanjutnya ada suatu proses demokratisasi/mempasal-33-kan badan usaha tersebut, sebenarnya mencerminkan suatu sistem yang masih percaya pada kekekuatan pasar yang memerlukan suatu kontrol untuk dapat mengatur berjalannya pasar agar tetap pada paradigma perekonomian kita yaitu kekeluargaan dan kebersamaan (sistem sosialis). Masa transisi ini merupakan proses untuk menciptakan kontrol dalam sistem dengan suatu usaha membangun infrastruktur pasar yang kuat dan kelembagaan yang mencakup struktur kekuasaan, representasi politik, birokrasi, lembaga kontrol sosial dan sistem hukum sebagai landasan dalam sistem ekonomi pasar yang tetap memegang teguh perekonomian rakyat dan demokrasi ekonomi (sosialisme-pasar).

Dalam proses transformasi inilah peran pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan bukannya terlalu banyak mengatur jalannya perekonomian, sehingga distorsi pasar dapat dihindarkan dari masuknya unsur-unsur kepentingan politik. Di sini jelas terlihat harus adanya demarkasi antara kepentingan politik dan kebijaksanaan ekonomi sehingga proses transformasi menuju pada pembangunan kelembagaan ini tidak terganggu oleh peranan pemerintah yang terlalu besar yang mengarah pada etatisme ekonomi.

Jadi kajian dari proses transformasi dari sistem ekonomi sosialis sentral menuju sosialisme pasar inilah yang dapat menyumbangkan pemikiran dalam sistem perekonomian Indonesia, yang masih percaya pada kekuatan pasar dengan tetap pada jiwa dan paradigma kekeluargaan dan kebersamaan.

Daftar Pustaka

Bornstein, Morris. *Comparative Economic System: Models & Cases*. 7th ed. Sidney: Richard D. Irwin Inc., 1994.

Dahl, Robert A. & Charles E. Lindblom. *Politik, Economics, and Welfare: Planning and Politico-Economics Systems Resolved into Basic Social Processes*. New York, Evanston and London: Harper & Row Publisher, 1953.

Galbraith, John Kenneth & Stanislav Menshikov. *Capitalism Communism and Coexistence from a Bitter Past to a Better Prospect*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1988.

Hatta, Mohammad. *Persoalan Sosialisme Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1960.

Icozlov, G..A. *Political Economy Socialism*. Moskow: Progress Publishers, 1977.

Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. 16th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Swasono, Sri-Edi. "Menuju Pembangunan Perekonomian Rakyat: Apa tanggung jawab pendidikan tinggi kita". Pidato diucapkan pada Dies Natalis Universitas Janabadra, Yogyakarta, 7 Oktober 1998.

Swasono, Sri-Edi. "Demokrasi Ekonomi Komitmen dan Pembangunan Indonesia". Pidato diucapkan pada pengukuhan guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 13 Juli 1988.

Zimbalist, Andrew et. al. *Comparative Economic Systems: Political Economics Approach*. 2nd ed. Florida: Hartcouth Brace Jovanovich Inc. Florida, 1989.